

**BAB IV**  
**PEMIKIRAN TENTANG STRATEGI POLITIK**  
**M. AMIEN RAIS**

**A. Pola Strategi Perjuangan.**

Membincang masalah pola strategi perjuangan, akan banyak ditemui berbagai pikiran yang berkembang di kalangan umat Islam yang note benenya ingin melakukan rekonstruksi atas keadaan bangsa ini ( Indonesia ). Ada yang beranggapan bahwa sangat penting untuk masuk ke dalam sistem kekuasaan, baik sebagai pelaku secara langsung ataupun hanya sebagai perumus kebijakan atau menjadi *king makers* bagi personalia yang bergerak dalam pemerintahan. Di pihak lain muncul sikap untuk lebih mengutamakan pengembangan kemampuan melakukan perubahan, tanpa harus masuk kedalam sistem kekuasaan. Dalam pandangan Kuntowijoyo ada tiga macam strategi yang diterapkan umat islam selama ini. Ketiga strategi itu ialah struktural, kultural, dan mobilitas sosial (Kuntowijoyo, 1997:227).

Strategi Struktural merupakan pola perjuangan umat melalui jalur kekuasaan. (Arief Afandi, 996: 4). Disebut Struktural, kalau perjuangan itu memakai struktur teknis; birokrasi, lembaga-lembaga negara, partai-partai dan

semua usaha yang mengarah ke pengambilan keputusan politik. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, strategi struktural cenderung menuntut jatah terlebih dahulu dalam kekuasaan sebagai cermin *representativeness* dari sebuah negara demokratis. Strategi struktural lebih mementingkan perubahan perilaku kolektif dan struktur politik. Lahirnya ICMI misalnya, karena ada perubahan struktur.

Sedangkan strategi kultural lebih mengarah pada hal-hal yang menyangkut masyarakat, jauh dari ranah birokratis maupun politis. Kuntowijoyo membagi lima program kultural, yaitu mengembalikan dan mengembangkan ; (1) tradisi rasional, (2) tradisi egalitarian, (3) tradisi berbudaya, (4) tradisi ilmiah, (5) tradisi kosmopolitan. (Kuntowijoyo, 1996: 4). Kelima program tersebut merupakan strategi pemberdayaan masyarakat untuk mencapai suatu cita-cita ideal.

Adapun mengenai strategi mobilitas sosial, merupakan strategi baru bagi pengembangan umat Islam (Indonesia) yang selama ini terpinggirkan. Sepanjang 1970 - 1990 "Islam politik" dikucilkan, maka sejak 7 (tahun) yang lalu Islam telah menempatkan dirinya pada posisi yang cukup representatif bagi pola pembangunan Indonesia.

Pada periode perlawanan, yaitu sepanjang abad ke 19, perlawanan terhadap kolonialisme selalu berpusat di

desa. Umat Islam di kota hanya "melawan dengan hati". Persis seperti itu, kaum terpelajar dan usahawan muslim mengalami mobilitas sosial menjelang dasa warsa terakhir pada abad ke 20. Lahirnya ICMI, barangkali setelah berkaca dengan mobilitas sosial yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. (Kuntowijoyo, 1997: 230).

Fenomena yang berkembang di negeri ini, menunjukkan beragamnya pola strategi perjuangan yang digunakan oleh "sang tokoh" dalam usahanya mengubah keadaan yang memang perlu adanya perubahan. M. Amin Rais menggunakan jalur atas sebagai manifestasi dari demokrasi. Umat Islam harus mendapatkan tempat, karena Islam di Indonesia adalah mayoritas.

Hal itu adalah wajar, karena menurut M. Amin Rais - sebagaimana dikutip Arif Afandi - selama orde baru ini umat Islam tidak memperoleh representasi politik yang adil dan wajar. Di legeslatif maupun eksekutif umat islam yang 88 persen sampai kurang lebih 5 tahun yang lalu hanya diwakili 65 per sen, padahal dimanapun juga di dunia ini, yang namanya demokrasi itu harus mencerminkan *representativenss goverment* (Arif Afandi, 1996:5). Artinya umat Islam harus memegang kendali atas negara ini, dengan representasi kepemimpinan Islam dipemerintahan dan legeslatif.

Dilain pihak, berkembang pemikiran dikalangan umat Islam yang menempatkan strategi perjuangan umat sebagai bagaian dari perjuangan demokrasi. Salah satu yang dengan gigih mensosialisasikan pola ini adalah Gus Dur. Tokoh Islam yang satu ini cenderung menempatkan perjuangan umat hanya sebagai bagaian dari perjuangan untuk menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis di negeri ini.

M. Amien Rais, cenderung mempunyai prinsip bahwa perjuangan politik umat Islam untuk membangun masyarakat yang lebih baik, tidak bisa lain kecuali lewat demokrasi. Esensi demokrasi, tandasnya, kedaulatan harus diberikan kepada rakyat dan aspirasi dari rakyat harus mengejawantah didalam kehidupan eksekutif dan legeslatif. (M. Amien Rais, 1996: 4).

Yang patut digaris bawah, strategi perjuangan yang diyakini M. Amien Rais, bukanlah demokrasi politik belaka, tetapi juga harus menjamin adanya kesamaan oportunitas dan kesamaan hasil dalam kehidupan sosial ekonomi. Untuk membangun masyarakat (umat Islam) yang lebih baik, harus ada keadilan sosial ekonomi. Demokrasi politik tanpa adanya keadilan sosial ekonomi masih amat *pincang* juga bertubrukan dengan ajaran Islam.

Apa yang diperjuangkan oleh M. Amien Rais, setidaknya merupakan suatu kepedulian terhadap penempatan demokrasi, yaitu bagaimana Islam dan

demokrasi mendapat tempat yang sangat wajar dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia yang telah memasuki usia lebih dari setengah abad ini.

## **B. Strategi Struktural.**

Diskursus tentang hubungan Islam dan negara merupakan tema yang tak pernah usai dibahas. Salah satu dimensi persoalan yang selalu melahirkan perbedaan adalah bagaimana Islam seharusnya menempatkan diri dalam sistem sosial politik. Dengan kata lain, bagaimana strategi perjuangan umat dirumuskan dalam masyarakat negara - bangsa yang plural ini.

Sebagaimana diterangkan diatas, ada banyak macam strategi perjuangan yang berkembang. Salah satu pola perjuangan yang dipakai adalah strategi struktural yang dipakai M. Amien Rais, atau dalam bahasa Arif Afandi, pola strategi yang dipakai M. Amien Rais adalah memperjuangkan umat dengan melalui demokrasi atas.

Demokratisasi - kata Kuntowijoyo - memerlukan sejumlah perubahan struktur. (Kuntowijoyo, 1997: 228). Masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, yang terjadi setiap harinya, tidak terlepas dari kebijakan struktural. Dalam bingkai struktural, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana seharusnya umat "memainkan" struktur yang ada untuk meraih kepentingan-kepentingannya. (Kuntowijoyo, 1997: 214).

Sekarang umat Islam tidak berada di luar, atau di pinggir, tetapi di pusat. Sejarah politik Indonesia sejak 1970 - 1990 menunjukkan adanya pergeseran peranan umat dari pinggiran ke tengah. Umat Islam akan menghadapi persoalan bagaimana mengubah kesalahan pribadi menjadi kesalahan sosial. Untuk menjawab persoalan itu, umat Islam harus ada di lembaga eksekutif dan legislatif. Karena kesalahan pribadi yang dimiliki, akan terpancarkan dalam aplikasi sosial.

Dalam situasi dimana politik Islam tidak terakomodasikan kedalam struktur pelukan kekuasaan negara, M. Amien Rais cenderung untuk berada dikalangan umat, dan menjadi kritisi yang secara terus menerus melancarkan kecamannya pada sistem politik yang berlaku. Semua itu dilakukan karena memang kedua kakinya sepenuhnya berpijak pada umat dan tak ingin menyempal darinya.

Munculnya ICMI dan tampilnya sejumlah menteri dalam kabinet sekarang yang lebih "berwajah Islam", semakin memperkuat visi M. Amien Rais, bahwa representasi umat sedikit banyak telah terakomodasikan. Bagaimanapun juga, umat yang merupakan mayoritas dari masyarakat Indonesia itu harus lebih terakomodasikan kedalam negara. Ini sesuai dengan makna demokrasi menurut M. Amien Rais sendiri. Bahwa memang mayoritas harus betul - betul

mendapatkan tempat yang strategis dalam partisipasinya mengisi kemerdekaan negeri ini.

Pilihan demokratisasi melalui kebijakan struktural memberikan suatu kejelasan, bahwa perjuangan Islam bagi M. Amien Rais adalah perjuangan elite, sehingga demokratisasi adalah kesadaran etik yang dibangun dari kesadaran-kesadaran (tauhid) sebagai basis paradigma gagasannya mengenai *high politics*. Demokratisasi dengan demikian merupakan strategi pemberdayaan pesan etika keagamaan dalam kehidupan politik, sehingga otoritas elite merupakan konsekwensi kesadaran etik keagamaan. Dari sinilah pilihan mengenai model dan jalan demokrasi diambil. (A. Munir Mulhan, 1995: 4).

Apapun soalnya, formulasi strategi struktural adalah pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat. Ada dua langkah yang perlu diperhatikan, yaitu kesadaran kritis masyarakat dan solidaritas sosial. Kesadaran kritis akan muncul jika masyarakat dikenalkan dengan gagasan-gagasan kritis. Solidaritas akan muncul bila kelompok yang kritis bersatu dalam sebuah gerakan dan menularkan kesadaran itu pada masyarakat. Bila diperlukan masyarakat dapat berbuat secara kolektif.